



Judul : Tanpa Dukungan DPR - Hak Angket Bakal Percuma
Tanggal : Jumat, 15 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Tanpa Dukungan DPR

Hak Angket Bakal Percuma

WACANA pengguliran hak angket maupun jalur Mahkamah Konstitusi (MK) bakal sia-sia.

Perolehan suara duet pemenang sementara, Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran terpaut jauh dengan paslon lainnya. Apalagi kalau minim dukungan dari DPR.

"Kecurangan nggak mungkin terjadi dan sulit dibuktikan jika selisihnya begitu tinggi, 50 juta. Silakan kalau 10 ribu, 20 ribu. Tapi ini 50 juta suara. Sehebat apa bisa curang 50 juta suara?" ujar Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi di Jakarta.

Menteri Komunikasi dan Informatika itu mempertanyakan tujuan digulirkannya hak angket. Apalagi diketahui, sampai saat ini belum ada manuver signifikan dari fraksi-fraksi merealisasikannya di DPR.

"Jadi partainya mau nggak? Terus mau selidiki apa? Dasarnya apa, tujuannya apa? Harus jelas dong. Suatu gerakan, langkah itu kan harus ada tujuan," ujarnya.

Sementara Pendiri Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik (Kedai KOPI) Hendri Satrio mengingatkan, hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa berhasil bila gerakan dalam gedung parlemen didukung juga oleh gerakan ekstraparlemen.

"Hak Angket cuma berhasil bila gerakan dalam gedung parlemen didukung oleh gerakan dari luar gedung parlemen," kata Hensat, sapaan karibnya di akun X miliknya, Kamis (14/3/2024).

Menurutnya, gerakan di luar parlemen akan punya daya gedor bila tokoh Pilpres yang memobilisasi gerakan rakyat.

"Sebaliknya jika tokoh Pilpres memble, ya bakal anyep ini hak angket!" ujarnya.

Pada sidang paripurna pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa (5/3/2024), hanya Fraksi PKS, PKB, dan PDI Perjuangan (PDIP) yang menginterupsi mengenai hak angket dugaan kecurangan Pemilu.

Anggota Fraksi PKB DPR, Luluk Nur Hamidah menduga, ada pihak-pihak di parlemen maupun di luar yang berusaha menggagalkan bergulirnya hak angket. Luluk bahkan mendapat informasi, tokoh agama di luar parlemen ikut dimobilisasi menolak hak angket.

"Ada pihak-pihak yang juga dimobilisasi sedemikian rupa. Intinya mereka minta agar hak angket itu digagalkan," kata Luluk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Luluk menargetkan hak angket mulai bergulir di masa sidang ini. Bahkan bisa dibahas meskipun DPR memasuki masa reses. "Setelah pengajuan sudah bisa diterima, kita bisa membahas kapan saja. Saat masa reses pun tidak masalah," kata Luluk.

Diakui, saat ini pengajuan masih menunggu fraksi lain hingga 20 Maret saat pengumuman resmi hasil Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sejumlah fraksi di DPR belum fokus lantaran masih penghitungan Pemilihan Legislatif (Pileg).

"PPP misalnya nunggu momentum 20 Maret apakah akan lolos *parliamentary threshold* atau tidak. Kami sangat paham. Kami harus menunggu juga perwakilan dari fraksi lain karena kita tetap butuh dukungan mayoritas," tegasnya. ■ **FAQ**